

Personal security dan Economic security: Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat

Joeliaty¹, Sri Djatnika², Tarada Berlian Megananda³, Marthalina^{4*}

¹ Universitas Padjadjaran; joeliaty@unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran; sridjatnika@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran; tarada.berlian21@unpad.ac.id

⁴ Institut Pemerintahan Dalam Negeri; marthalina@ipdn.ac.id

* Correspondence: marthalina@ipdn.ac.id; Jl. Ampera Raya No.1, RT.1/RW.6, Cilandak Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Indonesia

Received: 27-10-2025; Accepted: 17-12-2025; Published: 24-12-2025

Abstrak: *Economic security dan personal security* merupakan dua dimensi penting dalam pendekatan *personal security* yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi perempuan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketimpangan akses ekonomi yang masih signifikan. Ketidakmandirian ekonomi perempuan memperkuat kerentanan terhadap kekerasan, terutama dalam lingkup domestik, karena terbatasnya kontrol terhadap sumber daya dan kesempatan kerja. Kondisi ini menghambat kontribusi perempuan dalam proses pembangunan dan memperlebar gap kesejahteraan di tingkat wilayah. Penelitian dalam dokumen ini menekankan bahwa penguatan pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada dua aspek utama: peningkatan akses ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan usaha, serta perlindungan komprehensif dari tindak kekerasan melalui penguatan regulasi, layanan pendampingan, dan sinergi kelembagaan. Upaya terintegrasi berbasis *personal security* diyakini dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor strategis dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keamanan Ekonomi; Keamanan Pribadi; Pemberdayaan Perempuan; Human Security; Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract: *Economic security and personal security* are two crucial dimensions of the *personal security* approach that influence the success of sustainable development, particularly for women in West Java Province. As the most populous province in Indonesia, West Java faces serious challenges in the form of high rates of violence against women and children and significant inequality in economic access. Women's economic insecurity exacerbates their vulnerability to violence, particularly in the domestic sphere, due to limited control over resources and employment opportunities. This situation hinders women's contribution to the development process and widens the welfare gap at the regional level. The research in this document emphasizes that strengthening women's empowerment needs to focus on two main aspects: increasing economic access through skills training and business opportunities, and comprehensive protection from violence through strengthened regulations, mentoring services, and institutional synergy. Integrated human security-based efforts are believed to be able to promote the achievement of sustainable development goals, particularly gender equality and reduced inequality. Thus, women become not only beneficiaries of development but also strategic actors in realizing a more inclusive and equitable development in West Java.

Keywords: *Economic Security; Personal Security; Women's Empowerment Human Security; Sustainable Development.*

1. Pendahuluan

Diskursus pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan sebagai bagian integral dari keberhasilan pembangunan. Agenda global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyerukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia melalui perlindungan sosial, pengurangan ketimpangan, dan jaminan rasa aman (Nur, 2019; Sari, Irwandi, Rochmansjah, Nurdiansyah, & Aslam, 2021; Wahdaniyah, 2025). Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan *personal security* yang memandang pembangunan harus memastikan *freedom from fear* dan *freedom from want* bagi seluruh individu (Peet, 1999; Zhang & Huang, 2026). Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan capaian ekonomi yang kuat, namun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek ketahanan sosial masyarakat. Ketimpangan ekonomi antarwilayah, tingginya dominasi pekerja sektor informal, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh tingkat *economic security* yang memadai. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan dan menurunkan kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

Di sisi lain, keamanan pribadi (*human security*) masyarakat terutama perempuan dan anak masih menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Berbagai laporan mencatat bahwa Jawa Barat secara konsisten berada pada posisi pertama tingkat nasional dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksiapan sistem perlindungan sosial dalam menghadapi dinamika risiko kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks. Kekerasan domestik, eksploitasi ekonomi, dan pelecehan seksual baik di ruang fisik maupun digital menjadi ancaman sistemik yang menghambat pemenuhan hak dasar perempuan sebagai agen pembangunan (Komnas Perempuan, 2023; KemenPPPA, 2024). Keterkaitan antara rendahnya *Economic security* dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan telah banyak dibahas dalam literatur internasional, bahwa ketergantungan finansial perempuan pada pasangan memperlemah posisi tawar dan memperbesar risiko terjebak dalam relasi yang tidak aman (Dewi, 2017; Razia, Akter, & Rahman, 2026; Sapta, 2011). Namun demikian, kajian empiris yang secara spesifik mengintegrasikan *economic security* dan *personal security* ke dalam agenda pembangunan daerah di Indonesia masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian mengenai Jawa Barat lebih berfokus pada aspek ketimpangan pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan, tanpa mengaitkan langsung dengan isu *personal security* dan *gender-based violence* sebagai variabel pembangunan manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap berupa kurangnya kajian yang melihat *economic security* dan *personal security* secara simultan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi. Novelty yang ditawarkan adalah kerangka keterhubungan antara indikator ketahanan ekonomi masyarakat dan risiko sosial berbasis gender, yang kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan

berkelanjutan dengan pendekatan *personal security* dan *economic security*. Dengan mengkaji secara kritis kondisi kerentanan ekonomi serta ancaman *personal security* di Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada pengembangan teori human development berbasis keamanan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat dan akselerasi capaian SDGs di tingkat daerah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam mengenai fenomena *economic security* dan *personal security* dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena isu keamanan manusia merupakan fenomena sosial yang kompleks, melibatkan permasalahan struktural, kebijakan publik, serta pengalaman yang dialami langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, interpretasi, dan dinamika sosial yang tidak selalu dapat dijelaskan secara numerik (Creswell, 2017). Dengan demikian, penelitian ini menekankan analisis kritis terhadap kondisi empiris, dokumen kebijakan, serta literatur akademik yang merepresentasikan realitas keamanan manusia di Jawa Barat. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur dari lembaga-lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), SIMFONI-PPA, serta laporan terbaru Komnas Perempuan. Dokumen kebijakan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak turut dikaji untuk menilai keselarasan antara kerangka regulatif dengan prinsip *personal security* dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Literatur akademik dari jurnal nasional dan internasional juga ditelaah untuk memperkuat landasan teori mengenai keterhubungan antara ketidakamanan ekonomi dan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender (Kreutzer, Millerd, & Timbs, 2023; Kumar & Mondal, 2024; Peet, 1999).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang menekankan proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Proses reduksi dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan mengenai kondisi sosial ekonomi perempuan, tingkat kekerasan, serta capaian program perlindungan sosial. Data kemudian dikategorikan ke dalam tema besar keamanan ekonomi, keamanan pribadi, serta instrumen kebijakan daerah. Selanjutnya interpretasi dilakukan secara kontekstual dengan mengacu pada teori *personal*

security (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007), sehingga dapat diidentifikasi korelasi antara faktor struktural ekonomi dengan meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan. Model analisis ini sejalan dengan pandangan Schreier (2012) yang menyatakan bahwa analisis isi tematik efektif digunakan untuk mengungkap pola makna dari berbagai sumber data teks. Untuk memastikan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan data antara lembaga pemerintah, media kredibel, serta penelitian ilmiah terdahulu. Triangulasi juga dilakukan pada tingkat teori dengan membandingkan perspektif studi pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2015) dan analisis kesetaraan gender. Prosedur ini dimaksudkan untuk meminimalkan bias subjektivitas peneliti serta meningkatkan keandalan interpretasi yang dihasilkan, sebagaimana disarankan oleh Denzin dan Lincoln (2018) dalam praktik penelitian kualitatif. Metode ini secara keseluruhan dirancang untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kondisi *economic security* dapat berdampak langsung terhadap *personal security* perempuan dan bagaimana pemerintah daerah merespons persoalan ini melalui kebijakan pembangunan yang inklusif. Hasil analisis diharapkan dapat mendukung argumentasi akademik bahwa peningkatan kapasitas ekonomi perempuan berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kekerasan berbasis gender dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

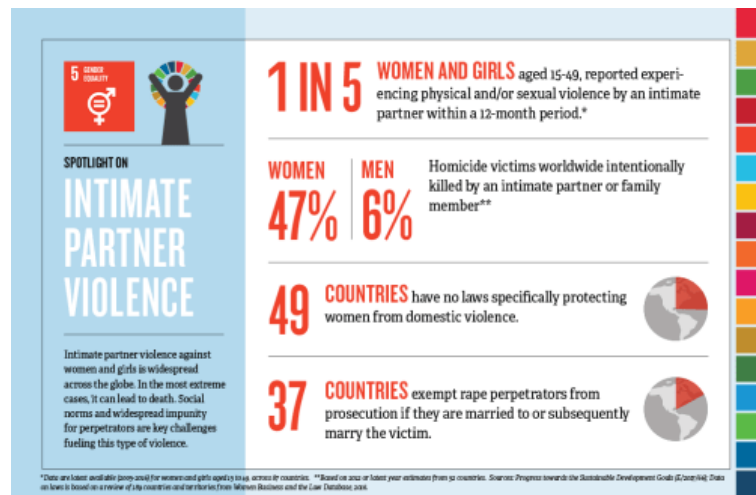
Pembangunan daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat, masih sangat terikat pada paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional yang berorientasi pada angka dan indikator makro seperti PDB, investasi, serta perluasan industrialisasi sebagai ukuran keberhasilan (Sachs, 2015). Paradigma ini kerap mengabaikan kontribusi dan kondisi perempuan sebagai kategori sosial yang menghadapi kerentanan struktural. Peran perempuan dalam sektor informal dan kerja domestik masih jarang diperhitungkan dalam statistik pembangunan, padahal memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam menopang rumah tangga dan ekonomi daerah (Kabeer, 1999). Lebih jauh lagi, kekerasan berbasis gender yang masih tinggi di Jawa Barat menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup perempuan (KemenPPPA, 2024). Jika *personal security* Perempuan baik di ruang publik maupun domestik—tidak terjamin, maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan bersifat semu dan tidak inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mengejar pertumbuhan tanpa melindungi martabat perempuan berarti mengabaikan setengah dari kekuatan pembangunan.

A. Penguatan Dimensi *Personal security* sebagai Kritik terhadap Model Pembangunan Konvensional

Dalam konteks tersebut, pendekatan *personal security* yang diperkenalkan UNDP (1994) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memindahkan fokus pembangunan dari negara ke individu, dan menetapkan dua pilar utama kesejahteraan masyarakat: bebas dari ketakutan (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*). Dua aspek ini sangat berkaitan dengan kehidupan perempuan: ketidakamanan ekonomi dapat meningkatkan risiko kekerasan domestik, sementara ketakutan atas kekerasan juga menghambat perempuan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, *economic security* dan *personal security* perempuan tidak dapat dipandang sebagai hasil samping pembangunan, tetapi prasyarat utama pembangunan berkelanjutan. *Personal security* mengkritik model pembangunan yang bersifat patriarkal dan menegaskan bahwa perempuan harus diposisikan sebagai aktor utama pembangunan, bukan penerima manfaat pasif (Pujiastuti, Izzaty, & Rinwanti, 2024; Sapta et al., 2011; Urbaningrum, 2025; Yunus, 2024). Bagi Jawa Barat, transformasi paradigma ini berarti bahwa kebijakan pembangunan daerah harus memastikan perempuan memiliki:

- ☒ akses ekonomi yang setara (pekerjaan layak, modal usaha, perlindungan sosial)
- ☒ perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan
- ☒ ruang aman untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik

Pendekatan pembangunan yang inklusif gender tidak hanya memberikan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan produktivitas regional dan memperkuat stabilitas sosial jangka panjang. Dalam kerangka SDGs, implementasi *personal security* berkontribusi langsung pada target SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 16 (Kelembagaan yang Tangguh dan Inklusif). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan Jawa Barat harus diukur dari sejauh mana perempuan dapat hidup aman, merdeka secara ekonomi, dan bebas berkontribusi bagi masyarakatnya. Jika perempuan masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kemiskinan, maka pembangunan tak dapat disebut adil maupun berkelanjutan.



Gambar 1. Intimate Partner Violence

Infografis tersebut menegaskan bahwa kekerasan oleh pasangan intim merupakan fenomena global yang sangat tinggi dan menjadi ancaman serius bagi *personal security* perempuan, di mana 1 dari 5 perempuan usia 15–49 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam setahun terakhir. Fakta bahwa perempuan sepuluh kali lebih berisiko dibanding laki-laki untuk menjadi korban pembunuhan oleh pasangan atau keluarga menunjukkan betapa kuatnya struktur kekuasaan patriarkal dalam kehidupan domestik, yang juga dapat dilihat pada tingginya kasus kekerasan perempuan di Jawa Barat. Jika pembangunan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan perempuan terbebas dari ancaman kekerasan dan memiliki perlindungan hukum yang kuat, maka pembangunan tersebut gagal memenuhi prinsip *personal security* yang menempatkan keselamatan individu sebagai pijakan utama. Dengan demikian, gambar ini memperkuat kritik bahwa model pembangunan konvensional yang masih mendominasi di Jawa Barat cenderung mengabaikan *personal security* perempuan, sehingga diperlukan pergeseran paradigma pembangunan menuju upaya yang menjadikan perempuan aman dari kekerasan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar dampak sampingannya.

B. Lingkaran Struktural Kekerasan: Ekonomi ↔ Pribadi ↔ Budaya

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah urban Provinsi Jawa Barat seperti Kota Bekasi, Depok, dan Bandung tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi dan sosial yang saling berkait dan saling mengunci. Sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan urbanisasi tinggi, kawasan ini menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang besar, seperti ketimpangan pendapatan, mahalnya biaya hidup, dan kompetisi kerja yang semakin ketat (Das & Chakraborty, 2025; Khalid, Majid, Saeed, Faheem, & Lemanski, 2025; Razia et al., 2026). Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya

stres psikologis rumah tangga yang kemudian memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam relasi personal. Ketika laki-laki sebagai pencari nafkah utama mengalami tekanan ekonomi, perempuan sering menjadi pelampiasan frustrasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual (Ginting & Sihura, 2020; Khadijah, 2022; Masruchiyah & Laratmase, 2023). Tekanan ekonomi yang kuat juga berdampak pada posisi tawar perempuan. Banyak perempuan di wilayah urban Jawa Barat bekerja di sektor informal yang tidak memiliki jaminan perlindungan sosial dan pendapatan stabil, sehingga mereka tetap bergantung pada pasangan sebagai sumber nafkah utama. Situasi ini menciptakan ketergantungan finansial yang membuat perempuan sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Kekerasan pun bertahan karena perempuan tidak memiliki cukup kekuatan ekonomi untuk menuntut keadilan atau mengambil keputusan mandiri seperti mengakhiri hubungan atau pindah tempat tinggal. Dengan demikian, ketergantungan ekonomi merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan struktural yang melemahkan *personal security* perempuan.

Selain faktor ekonomi, kekerasan juga dilanggengkan oleh budaya patriarki yang hegemonik. Norma sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam keluarga memberi legitimasi akan kontrol, termasuk kontrol yang berujung pada kekerasan. Budaya ini menciptakan pembenaran terselubung bahwa konflik rumah tangga adalah urusan privat, sehingga masyarakat cenderung enggan terlibat atau membantu korban. Korban sering kali dibungkam melalui rasa malu, ancaman, atau tekanan keluarga, sehingga melahirkan budaya *silence* yang kuat. Akibatnya, banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan dan menjadi fenomena “gunung es” yang sulit ditangani (Ajide, Dada, Tabash, & Al-Faryan, 2025; Ambler, Jones, & O’Sullivan, 2026; Wainaina et al., 2025; Wilson, Owusu-Brown, & Iddrisu, 2025).

Kondisi semakin buruk ketika sistem perlindungan negara belum bekerja optimal untuk mengatasi kasus kekerasan berbasis gender (Chen et al., 2025; Lokot et al., 2025). Layanan pengaduan memang tersedia dan meningkat tiap tahun, namun belum dibarengi dengan efektivitas penegakan hukum yang tegas, cepat, dan berpihak pada korban. Banyak pelaku kekerasan tetap bebas berkeliaran atau bahkan tetap tinggal serumah dengan korban sepanjang proses hukum berlangsung. Situasi ini menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan pada mekanisme hukum yang justru semakin melemahkan keberanian korban untuk melapor. Pelaku merasa aman, korban semakin tertekan lingkaran kekerasan pun terus berulang (Biswas & Banu, 2023; Dhanamalar, Preethi, & Yuvashree, 2020; Urbaningrum, 2025).

Oleh karena itu, penting dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan semata persoalan moral individu, melainkan lahir dari struktur sosial-ekonomi yang timpang dan diperkuat oleh kultur keluarga serta kebijakan publik yang belum berkeadilan gender. *Personal security* perempuan merupakan cerminan kualitas tata kelola sosial sebuah wilayah (ElMassah & Hassanein, 2025; Euler et al., 2025; Raman, Ustenko, Filho, & Nedungadi, 2025; Sahu & Behera, 2025; Zogo, Simplicie, Tchamyu, & Nnanna, 2025) ketika negara dan masyarakat gagal menjamin rasa aman perempuan dalam ruang domestik maupun publik, maka pembangunan apa pun akan kehilangan maknanya. Kekerasan yang terus terjadi menjadi alarm bahwa keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat sedang menghadapi ancaman serius yang berakar pada ketidaksetaraan yang terstruktur.

C. Program “Sekoper Cinta” sebagai Transformasi Sosial — Namun Belum Transformasional

Program Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) merupakan salah satu inovasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek yang menerima bantuan sosial. Program ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui pelatihan kelas—baik terkait kesehatan reproduksi, perlindungan hukum, penguatan psikososial, hingga pelatihan vokasional—Sekoper Cinta telah membuka peluang bagi banyak perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri mereka. Di dalam kelas-kelas Sekoper Cinta, perempuan yang sebelumnya tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat mulai menemukan keberanian untuk berbicara dan mengungkapkan pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman kekerasan rumah tangga (KDRT) dan diskriminasi gender yang selama ini mereka pendam. Kesadaran kritis bahwa perempuan memiliki hak untuk aman dan sejahtera menjadi modal penting dalam memutus siklus kekerasan yang kerap dianggap sebagai “nasib”. Selain itu, program ini telah membentuk jaringan sosial baru antarperempuan. Perempuan yang sebelumnya hidup dalam isolasi domestik kini menemukan dukungan komunitas yang membuat mereka merasa tidak sendiri dalam menghadapi persoalan hidup. Solidaritas ini adalah bagian penting dari transformasi sosial, karena membangun modal sosial yang memperkuat keberdayaan kolektif (Begum, 2025; Elbushra, Ahmed, Elmulthum, & Abdalla, 2025; Lu, Chen, & Hu, 2025).

Namun, meskipun berhasil menciptakan perubahan pada tingkat personal dan interpersonal, transformasi yang dihasilkan belum menyentuh akar struktural dari ketidakberdayaan perempuan. Sekoper Cinta belum sepenuhnya menjamin peningkatan

kapabilitas ekonomi nyata yang mampu mengubah posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Banyak perempuan telah lulus pelatihan, namun tidak mendapatkan akses ke modal usaha, pasar kerja yang layak, atau konektivitas dengan dunia industri. Alhasil, mereka tetap terperangkap dalam kondisi ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan (Dimova & Fielding, 2025; Vujadinović & Marjanović, 2025; Wulandari & Hj.Kassim, 2025). Keterbatasan lainnya terletak pada hubungan antara pemberdayaan dan sistem perlindungan hukum. Perempuan yang telah memahami haknya sering kali menemui kenyataan pahit bahwa melaporkan KDRT tidak semudah yang dibayangkan. Proses hukum yang panjang, minimnya dukungan petugas yang sensitif gender, serta stigma sosial yang menyalahkan korban menjadi tembok besar yang menghalangi tindakan nyata.

Sangat banyak contoh bahwa pemberdayaan tidak berarti kemerdekaan. Seorang perempuan korban KDRT yang mengikuti pelatihan Sekoper Cinta, misalnya, tetap tidak mampu keluar dari rumah pelaku karena tidak memiliki pendapatan tetap, anak-anak berada dalam kontrol keluarga pelaku, dan lingkungan sosial menganggap dialah penyebab kekerasan. Pada titik ini, edukasi semata tidak dapat membebaskan perempuan dari jerat kekerasan struktural yang mengunci kehidupan mereka. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus ditautkan secara sistemik dengan ekosistem perlindungan korban: akses pendampingan hukum, layanan kesehatan mental, jaminan ekonomi, serta dukungan komunitas dan negara. Pemberdayaan tidak boleh berhenti pada proses belajar—ia harus meluas menjadi perubahan struktural yang menjamin keselamatan, kemandirian ekonomi, dan martabat perempuan. Sekoper Cinta telah menjadi awal dari transformasi sosial, tetapi untuk menjadi benar-benar transformasional, program ini harus melampaui ruang kelas dan masuk ke ranah kebijakan ekonomi dan perlindungan hukum yang menghadirkan keberanian, kekuatan, dan kebebasan nyata bagi perempuan Jawa Barat.

D. Pemberdayaan Ekonomi: Dari Pelatihan Menuju Redistribusi Kekuasaan

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan dimensi fundamental dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka ekonomi inklusif gender, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh daya tawar yang setara dalam struktur ekonomi maupun sosial (Abdelwahed, Channa, Al-Doghan, & Soomro, 2025; Behera & Pradhan, 2025; Charokopaki & Chatzigianni, 2025; Efthymiadou & Farmaki, 2025; Kaaria & Murithi, 2025; Mishra, Mishra, & Sarangi, 2025). Hal ini berarti perempuan tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan aktor kunci yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi wilayah. Namun berdasarkan temuan dalam Laporan Hasil Penelitian 2025, mayoritas perempuan di Jawa Barat masih terkonsentrasi di sektor informal, seperti usaha mikro beromzet kecil, layanan rumah tangga, dan perdagangan skala kecil tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai

Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas perempuan belum diakui secara formal oleh sistem ekonomi yang berlaku. Aktivitas ekonomi perempuan dalam sektor informal sering kali tidak tercatat secara resmi sehingga kontribusi mereka tidak terukur dalam indikator pembangunan daerah. Hal ini bukan hanya sekadar persoalan statistik, tetapi persoalan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi tawar rendah baik dalam rumah tangga maupun dalam relasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Ketika perempuan tidak memiliki pendapatan mandiri, ketergantungan finansial terhadap pasangan atau keluarga akan semakin tinggi. Ketergantungan ini menjadi salah satu faktor krusial yang membuat perempuan kesulitan keluar dari siklus kekerasan domestik—walaupun mereka menyadari bahwa lingkungan tersebut tidak aman bagi dirinya maupun anak-anaknya.

Program pemberdayaan yang hanya mengandalkan pelatihan keterampilan dasar atau workshop motivasional belum cukup memutus akar persoalan. Pendekatan seperti ini berpotensi melahirkan kesadaran baru pada perempuan, tetapi tidak diikuti oleh perubahan struktural yang memungkinkan perempuan mengakses sumber daya ekonomi secara nyata. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan harus bergerak dari sekadar capacity building menuju redistribusi kekuasaan ekonomi. Redistribusi yang dimaksud bukan hanya mengenai akses modal dan pasar, tetapi pemerataan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan pengambilan keputusan ekonomi dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Terdapat **tiga level intervensi** yang perlu dioptimalkan. Pada tingkat mikro, perempuan harus mendapatkan akses setara terhadap sumber pembiayaan, kredit berbasis gender, serta mentoring bisnis yang berkelanjutan. Pada level meso, pemerintah perlu memperkuat kemitraan antara UMKM perempuan dengan sektor industri lokal serta platform digital sehingga peluang pemasaran lebih luas dan stabil. Pada level makro, insentif fiskal perlu diarahkan kepada lembaga usaha yang mempekerjakan perempuan dalam jumlah besar atau mendampingi pengembangan usaha perempuan di sektor strategis. Tiga level kebijakan ini menjadi instrumen sistemik yang tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga membangun posisi tawar mereka secara sosial. Pada akhirnya, kemandirian finansial merupakan bentuk perlindungan pertama bagi perempuan. Ketika perempuan mampu menentukan nafkah dan kehidupannya sendiri, ketakutannya terhadap tekanan dan kekerasan

akan berkurang signifikan. Pemberdayaan ekonomi yang transformatif tidak hanya menciptakan perempuan yang terampil, tetapi perempuan yang berkuasa atas hidupnya sendiri (Estrada, Galvin, Maassen, & Hörschelmann, 2023; Hussain & Jullandhry, 2020; Islam & Khan, 2025; Salcedo, Ruiz-Bravo, Barrantes, & Clausen, 2025). Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berkeadilan gender di Jawa Barat menjadi batu pijakan penting menuju tatanan masyarakat yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Penanganan Kekerasan sebagai Evaluasi Moral Negara

Dalam suatu negara yang mengaku demokratis, tolok ukur keberhasilan tidak dapat semata-mata dipusatkan pada grafik pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan investasi. Demokrasi sejati hanya dapat dinilai dari sejauh mana negara hadir melindungi kelompok rentan khususnya perempuan dan anak dari kekerasan yang mengancam hidup dan martabat mereka. Prinsip perlindungan ini merupakan manifestasi etika tertinggi negara: bahwa setiap warga, tanpa kecuali, memiliki hak untuk hidup aman dan bebas dari ketakutan. Oleh karena itu, efektivitas negara dalam menangani kekerasan berbasis gender sesungguhnya merupakan evaluasi moral terhadap kualitas demokrasi itu sendiri (Agarwal & Katewa, 2024; Cao, Lee, Nayga, & Quach, 2024; Frings-Hessami, 2025; Jejeebhoy & Sathar, 2024). Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Barat masih berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dari ribuan kasus yang tercatat, 1.858 kasus terjadi di dalam rumah, menjadikan lingkungan domestik sebagai ruang yang paling rentan dan berbahaya bagi perempuan dibandingkan ruang publik lainnya

Fakta ini ironis, karena rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat seseorang mendapatkan perlindungan dan kenyamanan. Ketika rumah berubah menjadi arena kekerasan, maka sesungguhnya negara sedang berhadapan dengan bencana yang tersembunyi di balik tembok-tembok privat yang jarang terjamah intervensi hukum dan kebijakan publik. Situasi tersebut mengungkapkan tiga persoalan fundamental dalam sistem perlindungan negara terhadap perempuan. **Pertama**, hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban. Perempuan korban kekerasan masih harus berhadapan dengan proses pembuktian yang berbelit, birokrasi panjang, dan kapasitas aparat yang masih minim perspektif korban. Luka trauma yang mereka bawa justru semakin dalam ketika sistem hukum mengharuskan mereka terus mengulang cerita, menghadapi pelaku di ruang sidang, dan membuktikan keabsahan penderitaan mereka sendiri.

Kedua, akses perlindungan belum merata. Perempuan di wilayah perkotaan relatif memiliki akses ke pusat layanan, shelter, dan pendamping hukum. Sebaliknya, perempuan di

daerah pedesaan menghadapi invisibility: penderitanya tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak tercatat. Di wilayah inilah kekerasan sering dianggap sebagai aib keluarga atau bagian dari “pendidikan suami”, sehingga korban terpaksa bungkam agar tidak mempermalukan keluarga. **Ketiga**, hegemoninya budaya patriarki terus melanggengkan kekerasan sebagai “urusan rumah tangga”, bukan pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan ini menciptakan struktur sosial yang menyalahkan korban sekaligus melindungi pelaku, sehingga kekerasan terus berjalan dalam siklus yang sulit diputus. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar. Negara tidak boleh hanya menunggu laporan datang, karena sebagian besar kekerasan tidak pernah dilaporkan. Negara harus aktif mengenali risiko, hadir dalam ruang privat melalui edukasi, sistem deteksi dini, dan layanan terpadu yang humanis. Intervensi negara juga harus memastikan perlindungan komprehensif—ekonomi, sosial, hukum, dan psikologis—agar perempuan memiliki kekuatan untuk keluar dari situasi kekerasan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga cerminan keberpihakan moral negara kepada warga yang paling rentan. Demokrasi hanya akan menemukan ruhnya ketika perempuan dapat hidup tanpa takut—di rumah, di tempat kerja, dan di ruang publik. Dengan demikian, keberhasilan negara dalam memberantas kekerasan berbasis gender bukan hanya sebuah kebijakan, melainkan ujian moral dan legitimasi demokrasi itu sendiri.

F. Jawa Barat Sebagai Role Model Baru Pembangunan Berkelanjutan

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dan lebih dari separuh populasinya adalah perempuan. Konstelasi demografi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan strategis dalam agenda pembangunan nasional. Ketika perempuan di Jawa Barat memperoleh *Economic security* dan *personal security* yang memadai, bukan hanya kesejahteraan individu yang meningkat, tetapi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah pun turut terkerek. Sebaliknya, apabila perempuan masih hidup dalam ketakutan dan keterbatasan, maka risiko sosial yang muncul tidak hanya membebani keluarga, tetapi juga melemahkan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan kesetaraan gender dan keamanan sosial sebagai fondasi utama transformasi masyarakat. Jawa Barat memiliki posisi strategis untuk menjadi percontohan nasional dalam integrasi kedua dimensi tersebut melalui pemberdayaan perempuan yang menyeluruh. Integrasi *economic security* dan *personal security* merupakan formula yang akan

menghasilkan multiplier effect terhadap indikator pembangunan lainnya: peningkatan produktivitas ekonomi daerah, generasi yang lebih sehat dan berpendidikan, serta ekosistem sosial yang lebih stabil.

Economic security memberikan ruang bagi perempuan untuk mandiri secara finansial, mengakses pekerjaan layak, dan mengelola usaha produktif. Ketika perempuan memiliki daya tawar ekonomi, ketergantungan pada pasangan berkurang, serta risiko terjebak dalam siklus kekerasan domestik menurun. Di sisi lain, *personal security* memastikan perempuan terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam ruang publik tanpa rasa takut. Kedua bentuk keamanan ini tidak terpisahkan; ia membentuk lingkaran saling menguatkan yang menjadi prasyarat utama terciptanya masyarakat inklusif. Dalam konteks Jawa Barat, program-program pemberdayaan seperti Sekoper Cinta sudah menjadi langkah penting yang patut diapresiasi, karena bukan hanya memberikan peningkatan keterampilan vokasional tetapi juga memperkuat kapasitas personal perempuan dalam mengenali hak-haknya dan membangun jaringan komunitas yang suportif. Namun, agar Jawa Barat benar-benar menjadi role model pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada ranah pelatihan dan penyadaran, melainkan harus diikuti oleh penataan kebijakan struktural yang memberikan akses modal usaha, perlindungan hukum yang berpihak, serta layanan rehabilitasi yang terintegrasi bagi penyintas kekerasan.

Dengan populasi besar dan dinamika sosial yang heterogen, keberhasilan Jawa Barat dalam mengelola program pemberdayaan perempuan akan menjadi cerminan kemampuan Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan secara nasional. Jika keamanan dan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat dapat diperkuat, maka tercipta output dan outcome yang jauh lebih luas ketimbang program sektoral biasa: meningkatnya partisipasi perempuan di dunia usaha dan pemerintahan, terbangunnya keluarga yang lebih resilien, serta berkurangnya angka kekerasan berbasis gender sebagai indikator kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan jangka panjang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan bukanlah program tambahan ataupun sekadar pemenuhan kuota gender. Ia merupakan strategi utama dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Jawa Barat berpotensi menjadi pionir yang membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa aman, sejahtera, dan berdayanya perempuan sebagai pilar utama masyarakat.

4. Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait *Economic security* dan *personal security* perempuan. Kondisi ini ditandai oleh tingginya angka kekerasan berbasis gender, kesenjangan sosial-ekonomi, ketidaksetaraan akses sumber daya, serta kerentanan struktural yang dialami perempuan di wilayah urban maupun rural. Penelitian menegaskan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan agar dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Pertama, *personal security* perempuan di Jawa Barat masih terganggu oleh tingginya prevalensi kekerasan. Data menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi secara nasional. Bentuk kekerasan yang dominan meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan terutama kekerasan seksual yang menduduki persentase terbesar. Rumah tangga tercatat sebagai lokasi paling banyak terjadinya kekerasan, sehingga relasi domestik justru menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan. Remaja perempuan usia 13–17 tahun merupakan kelompok korban terbanyak yang menunjukkan tingginya kerentanan perempuan sejak usia dini. Sementara itu, hambatan pelaporan kekerasan masih ditemukan akibat stigma sosial, keterbatasan bukti, dan minimnya akses layanan hukum serta kesehatan. Fenomena gunung es pada pelaporan kasus menggambarkan masih banyak korban yang belum memperoleh perlindungan. Selain itu, meskipun layanan pengaduan merupakan yang paling banyak diberikan oleh pemerintah daerah, bentuk layanan lain seperti rehabilitasi sosial, perlindungan hukum, dan layanan psikologis belum menjangkau seluruh korban secara optimal. Tantangan infrastruktur layanan perlindungan ini memperburuk kondisi *personal security* perempuan, karena korban sering kali tetap berada dalam siklus kekerasan.

Kedua, ketergantungan ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi keluarga, keterbatasan akses kerja bagi perempuan, dominasi laki-laki sebagai pencari nafkah, serta kultur patriarkal memperlemah posisi tawar perempuan dalam hubungan rumah tangga. Perempuan korban kekerasan kerap tidak dapat meninggalkan pelaku karena tidak memiliki kemandirian finansial. Hal ini membuktikan bahwa *Economic security* merupakan fondasi penting bagi *personal security* perempuan. Profil pembangunan ekonomi Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun daerah ini memiliki jumlah penduduk usia produktif besar, namun akses perempuan kepada pekerjaan layak masih terbatas. Tingginya sektor pekerjaan informal yang rentan, kesenjangan upah berdasarkan gender, serta rendahnya kepemilikan usaha mandiri oleh

perempuan memperdalam ketidaksetaraan ekonomi. Perempuan kepala keluarga dan pekerja informal menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kemiskinan dan eksploitasi ekonomi.

Ketiga, penelitian mengaitkan kedua permasalahan tersebut dengan kerangka human security, yakni pemenuhan “freedom from fear” (perlindungan dari kekerasan) dan “freedom from want” (pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar). Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu gender, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan lebih inklusif ketika perempuan dapat berpartisipasi secara produktif dan aman dalam aktivitas sosial ekonomi. Program Sekoper Cinta menjadi salah satu intervensi strategis yang dikaji dalam penelitian. Program ini terbukti memberi dampak positif pada peningkatan kapasitas personal dan sosial perempuan melalui edukasi, peningkatan literasi, dan dukungan pemberdayaan. Namun, program ini belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan keamanan ekonomi, seperti akses pembiayaan formal, perlindungan pekerja perempuan, dan penguatan usaha mandiri. Selain itu, respon sistemik terhadap kekerasan berbasis gender juga masih perlu diperkuat, terutama dalam integrasi layanan hukum, kesehatan, dan psikososial.

Dalam tataran regulatif, Provinsi Jawa Barat telah memiliki landasan hukum yang kuat seperti Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, serta mengacu pada standar nasional layanan korban kekerasan. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala implementasi yang belum merata, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan terbatasnya mekanisme monitoring serta pendanaan berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan bahwa sinergi antara *Economic security* dan *personal security* merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya: (1) SDG 5: Kesenjangan Gender; (2). SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (3). SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh, (4). SDG 10: Pengurangan Ketimpangan. Pemberdayaan perempuan berkontribusi signifikan terhadap transformasi sosial yang berdampak jangka panjang pada kualitas pembangunan manusia di Jawa Barat. Peningkatan akses perempuan pada pendidikan, pasar tenaga kerja, dan kepemilikan usaha adalah instrumen yang mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memutus mata rantai kekerasan. Penelitian juga menekankan urgensi kolaborasi multipihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, maupun komunitas lokal. Pendekatan partisipatif tersebut memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah yang inklusif dan responsif gender.

Transformasi pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila perempuan memiliki akses penuh terhadap rasa aman, kesempatan yang adil, dan ruang partisipasi yang bermakna. Ketika perempuan aman secara ekonomi dan pribadi, maka ketahanan keluarga, komunitas, dan pembangunan daerah akan semakin kuat.

5. Daftar Pustaka

- Abdelwahed, N. A. A., Channa, A., Al-Doghan, M. A., & Soomro, B. A. (2025). Building a resilient economy: green initiatives and green entrepreneurship for women's empowerment. *International Journal of Development Issues*. <https://doi.org/10.1108/IJDI-12-2024-0329>
- Agarwal, S., & Katewa, N. (2024). Improving Women's Position in the Household: Evidence from a Maternity Cash Transfer Programme in India. *European Journal of Development Research*, 36(6), 1471–1518. <https://doi.org/10.1057/s41287-024-00647-8>
- Ajide, F. M., Dada, J. T., Tabash, M. I., & Al-Faryan, M. A. S. (2025). Financial Inclusion, Women Empowerment, and Informal Economy in Africa. *Poverty and Public Policy*, 17(4). <https://doi.org/10.1002/pop4.70029>
- Ambler, K., Jones, K. M., & O'Sullivan, M. (2026). Increasing women's empowerment: Evaluating two interventions in Uganda. *Journal of Development Economics*, 178. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103575>
- Begum, K. (2025). Empowering women in agriculture: Critical role of gender-intentional investments in Pakistan. *Women's Studies International Forum*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103145>
- Behera, B. K., & Pradhan, P. (2025). Decoding the Nexus of Economic Empowerment, Status Inconsistency, and Intimate Partner Violence Among Women in India. *Journal of International Development*, 37(5), 1140–1153. <https://doi.org/10.1002/jid.4002>
- Biswas, B., & Banu, N. (2023). Economic empowerment of rural and urban women in India: A comparative analysis. *Spatial Information Research*, 31(1), 73–89. <https://doi.org/10.1007/s41324-022-00472-3>
- Cao, T. M., Lee, J., Nayga, R. M., & Quach, D. T. (2024). Can women empowerment enhance rice productivity? The case of Vietnam. *Sustainable Development*, 32(6), 6274–6285.

<https://doi.org/10.1002/sd.3025>

- Charokopaki, M., & Chatzigianni, E. E. (2025). Empowering the Game: The Global Push for Gender Equality in Sport Governance. *International Journal of Sport and Society*, 16(3), 93–122. <https://doi.org/10.18848/2152-7857/CGP/v16i03/93-122>
- Chen, G., Naveed, R. T., Singh, A., Waris, M., Naseem, W., & Muneer, S. (2025). The effect of women's development on the relationship between the social impact of green microfinance institutions and poverty in Pakistan. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00790-0>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
- Das, S., & Chakraborty, B. (2025). Women Empowerment, Parental Education and Future Human Capital Formation (Evidences from Urban Slum Area in India). *Journal of Quantitative Economics*. <https://doi.org/10.1007/s40953-025-00469-3>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, Y. S. (2017). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Women in Sustainable Development. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 12(2), 61–64. <https://doi.org/10.21009/plpb.122.05>
- Dhanamalar, M., Preethi, S. J. G., & Yuvashree, S. (2020). Impact of digitization on women's empowerment: A study of rural and urban regions in India. *Journal of International Women's Studies*, 21(5), 107–112. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091717579&partnerID=40&md5=d07a949bebf503596862315c2a41e602>
- Dimova, R., & Fielding, D. (2025). Ethnicity, Women's Empowerment and Decisions about Children's Education in Ghana. *Journal of African Economies*, 34(3), 324–343. <https://doi.org/10.1093/jae/ejae009>
- Efthymiadou, F., & Farmaki, A. (2025). Female Airbnb hosts' empowerment and effects on quality of life. *Anatolia*, 36(2), 217–237. <https://doi.org/10.1080/13032917.2024.2388667>
- Elbushra, A. A., Ahmed, A. E., Elmulthum, N. A. M., & Abdalla, I. F. (2025). Nexus of

- Women's Empowerment and Economic Growth in Saudi Arabia. *Sustainability (Switzerland)*, 17(17). <https://doi.org/10.3390/su17177949>
- ElMassah, S. S., & Hassanein, E. A. (2025). Advancing environmental sustainability in the UAE: the interplay of women's empowerment, financial development, and natural resource management. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02002-1>
- Estrada, M., Galvin, M., Maassen, A., & Hörschelmann, K. (2023). Catalysing urban transformation through women's empowerment in cooperative waste management: the SWaCH initiative in Pune, India. *Local Environment*, 28(7), 852–866. <https://doi.org/10.1080/13549839.2022.2090532>
- Euler, M., Cheesman, S., Keya, F., López-Ridaura, S., Rahman, M., & Krupnik, T. J. (2025). Gender (in)equity and the adoption of farm machinery: Opportunities and trade-offs in Bangladesh livestock systems. *Journal of Rural Studies*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103839>
- Frings-Hessami, V. (2025). Gendered recordkeeping practices in marginalised communities in Bangladesh. *Information Research*, 30(iConf (2025)), 319–329. <https://doi.org/10.47989/ir30iConf47344>
- Ginting, E., & Sihura, H. Z. (2020). Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender (Studi Kasus : Perbandingan Kebijakan pemberdayaan perempuan Kota Surabaya dan Probolinggo dibidang UMKM) Pendahuluan Kepemimpinan perempuan di berbagai daerah telah memberikan warna yang ber, 03(2), 201–213.
- Hussain, S., & Jullandhry, S. (2020). Are urban women empowered in Pakistan? A study from a metropolitan city. *Women's Studies International Forum*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2020.102390>
- Islam, F., & Khan, M. A. (2025). Exploring the socio-economic vulnerability model: a multi-stakeholder analysis of women's trafficking in Bangladesh. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2549477>
- Jejeebhoy, S. J., & Sathar, Z. A. (2024). Revisiting Women's Empowerment and Contraception. *Population and Development Review*, 50, 597–623. <https://doi.org/10.1111/padr.12688>

- Kaaria, J. K., & Murithi, I. K. (2025). Determinants of Women Empowerment: Case of Refugee Women Living in Nairobi Kenya. *Economies*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/economies13020035>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2024. KemenPPPA.
- Khadijah, S. A. R. (2022). Pemberdayaan Dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Warta Pariwisata*, 20(1), 18–21. <https://doi.org/10.5614/wpar.2022.20.1.05>
- Khalid, R., Majid, H., Saeed, R., Faheem, A., & Lemanski, C. L. (2025). Spatializing Women's Everyday Access To Energy: An Intra-urban Comparison of the Gender Energy Nexus in Lahore, Pakistan. *International Journal of Urban and Regional Research*, 49(3), 660–681. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.13311>
- Kreutzer, W., Millerd, C., & Timbs, N. (2023). Disasters and the diminishing of women's economic empowerment. *Disasters*, 47(4), 891–912. <https://doi.org/10.1111/disa.12582>
- Kumar, S., & Mondal, S. (2024). Empowerment of women from the experience of Indian states: a reflection of NFHS-5. *GeoJournal*, 89(2). <https://doi.org/10.1007/s10708-024-11065-y>
- Lokot, M., Sultana, N., Hidrobo, M., Hoddinott, J. F., Roy, S., & Ranganathan, M. (2025). How social norms influence processes of change related to an economic intervention in Bangladesh. *SSM - Qualitative Research in Health*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2025.100651>
- Lu, H., Chen, F., & Hu, W. (2025). Empowering rural women through internal migration: Evidence from longitudinal data in China. *Women's Studies International Forum*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103152>
- Masruhiyah, N., & Laratmase, A. J. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen*

- Lingkungan*, 12(2), 125–138. <https://doi.org/10.21009/10.21009.122.3>
- Mishra, P. K., Mishra, S. K., & Sarangi, M. K. (2025). Does Gender Equality Support Women-led Economic Growth in G20 Countries? *Millennial Asia*. <https://doi.org/10.1177/09763996251356996>
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *An-Nisa*, 10(1), 99–111. <https://doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388>
- Peet, E. (1999). Theories of Development. In Feminist Theories of Development. *The Guilford Press*, 5(4), 995–1010.
- Pujiastuti, Y., Izzaty, K. N., & Rinwanti, R. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 10(2), 219–225. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v10i2.2594>
- Raman, R., Ustenko, V. S., Filho, W. L., & Nedungadi, P. (2025). Energy justice and gender: bridging equity, access, and policy for sustainable development. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01375-7>
- Razia, S., Akter, M., & Rahman, M. A. (2026). Do gender equality and women's empowerment influence socially sustainable urban development in developing cities? *Women's Studies International Forum*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103220>
- Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.
- Sahu, P. R., & Behera, D. K. (2025). Barriers to women's empowerment in India's informal sector: structural and socio-economic constraints. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01398-0>
- Salcedo, M., Ruiz-Bravo, P., Barrantes, N., & Clausen, J. (2025). Measuring Multidimensional Women's Empowerment With Data From Partnered Women Across 45 Low- And Middle-Income Countries. *Social Indicators Research*, 176(3), 1093–1119. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03505-6>
- Sapta, Y., Koordinator, D., Perempuan, A., & Berkelanjutan, P. (2011). Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan Woman in Sustainable Development,

XII(September), 61–64.

- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H. R., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE Publications.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. (2007). *Human security: Concepts and implications*. Routledge.
- UNDP. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. United Nations Development Programme.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development*. United Nations.
- UN Women. (2021). *Progress on the Sustainable Development Goals: Gender snapshot 2021*. UN Women.
- Urbaningrum, R. N. (2025). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kapetakan Kabupaten Cirebon: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, dan Keseimbangan Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(7), 1633–1639. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i7.2448>
- Vujadinović, J., & Marjanović, D. M. (2025). Empowering Women in Serbian Rural Areas with Entrepreneurial Initiatives. *Journal of Women's Entrepreneurship and Education*, 2025(1–2), 40–58. <https://doi.org/10.28934/jwee25.12.pp40-58>
- Wahdaniyah, S. R. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan untuk Perempuan Rentan : Praktik Dompot Dhuafa di Kota Makassar, 300–310.
- Wainaina, C. W., Igonya, E. K., Kumar, M., Browne, J. L., Sidze, E., Janssens, W., ... de Wit, J. B. F. (2025). Women's empowerment and mental well-being: A qualitative study in Rural Kenya. *SSM - Qualitative Research in Health*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2025.100646>
- Wilson, J., Owusu-Brown, B., & Iddrisu, S. (2025). Female labour force participation, power dynamics, and adoption of LPG for cooking in Ghana. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00833-6>
- Wulandari, P., & Hj.Kassim, S. (2025). Empowering female entrepreneurs through access to

- digital microfinance services. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 17(2), 245–261. <https://doi.org/10.1108/IJGE-04-2024-0130>
- Yunus, M. (2024). Eksplorasi Model Inovasi Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Ekonomi Berkelanjutan. *Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 166–174. <https://doi.org/10.59613/tg4w3014>
- Zhang, C., & Huang, H. (2026). Entanglement of modernity, ethnicity, and contested empowerment: Gendered paradoxes in a Miao Village Development in China. *Women's Studies International Forum*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103200>
- Zogo, T. E., Simplice, A. A., Tchamyou, V. S., & Nnanna, J. (2025). Women Political Empowerment and Coup d'état in Africa, 1980–2020. *African Development Review*, 37(3). <https://doi.org/10.1111/1467-8268.70020>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).